

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
TERHADAP NELAYAN DANAU TEMPE**

**THE IMPACT OF FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT POLICIES ON
THE FISHERMEN OF LAKE TEMPE**



AZISAN

E052222003



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN TERHADAP NELAYAN DANAU TEMPE**

AZISAN

E052222003



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TERHADAP NELAYAN DANAU TEMPE

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Ilmu Politik

Disusun dan diajukan oleh

AZISAN

E052222003

kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
TERHADAP NELAYAN DANAU TEMPE**

AZISAN


E052222003

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Akhir Magister pada, 23 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

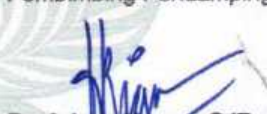
Program Studi Magister Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

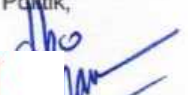
Pembimbing Utama


Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.
NIP 197508182008011008

Pembimbing Pendamping


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP 197107051998032002

Program Studi Magister
Ilmu Politik,


Yunus, S.IP., M.Si
7051998032002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.
NIP.197508182008011008



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Dampak Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan terhadap Nelayan Danau Tempe" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. phil. Sukri, M.Si dan Dr. Ariana, S.IP., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal Public Policy, Volume 10 (1), Halaman 69-75, dan DOI: <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i1.7809> sebagai artikel dengan judul "Government Policy Contradictions and Their Impact on Lake Tempe Fishermen: A Case Study of Pallawang and Pakkajalalla". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Agustus 2024



Ucapan Terima Kasih

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. phil. Sukri, M.Si. sebagai pembimbing utama dan Dr. Ariana, S.IP., M.Si. sebagai pembimbing pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam perkuliahan.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta, saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh Pendidikan.

Penulis



AZISAN



ABSTRAK

AZISAN. Dampak kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan terhadap nelayan danau tempe (dibimbing oleh Sukri dan Ariana)

Latar Belakang. Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan sumber daya alam yang penting bagi masyarakat setempat terutama pada sektor perikanan. Pengelolaannya diatur dalam kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Kurangnya penelitian mengenai intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan mendasari penelitian ini. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan terhadap nelayan Danau Tempe. **Metode.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada teori evaluasi kebijakan dan konsep dampak kebijakan dalam proses analisisnya. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan perikanan di Danau Tempe yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, kurang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi nelayan dikarenakan tidak konsisten dalam penerapannya. Implementasi kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan keberlanjutan sumberdaya perikanan, sering kali menghadapi berbagai tantangan termasuk kurangnya pengawasan dan pemahaman yang tidak merata di kalangan nelayan. Selain itu, intervensi politik dalam implementasi peraturan daerah juga mempengaruhi efektivitas kebijakan. **Kesimpulan.** Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih baik dan adil di Danau Tempe, diperlukan peningkatan dalam pengawasan, program yang mendukung produktivitas nelayan, transparansi serta konsistensi dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang ada dapat lebih mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan dan kesejahteraan nelayan setempat.

Kata kunci: danau tempe, pengelolaan sumberdaya perikanan, kebijakan perikanan, Perda No. 4 Tahun 2012, evaluasi kebijakan, dampak sosial-ekonomi



ABSTRACT

AZISAN. The impact of fisheries resource management policies on the fishermen of lake tempe (supervised by Sukri dan Ariana)

Background. Lake Tempe, located in Wajo Regency, South Sulawesi Province, is an important natural resource for the local community, especially in the fisheries sector. Its management is governed by Regional Regulation No. 4 of 2012 concerning Fisheries Resource Management. The lack of research on government intervention in fisheries management underpins this study. **Aim.** This study aims to analyze the impact of fisheries resource management policies on the fishermen of Lake Tempe. **Methods.** The method used was qualitative approach based on policy evaluation theory and the concept of policy impact. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and document analysis. **Results.** The study results show that fisheries management policy in Lake Tempe regulated by Regional Regulation No. 4 of 2012, has had a limited impact on the social and economic lives of fishermen due to inconsistent implementation. The implementation of this policy, although aimed at enhancing the sustainability of fisheries resource, often faces various challenges, including a lack of supervision and uneven understanding among fishermen. Additionally, political interventions in the implementation of regional regulations also affect the effectiveness of the policy. **Conclusion.** This study concludes that to achieve better and fairer fisheries resource management in Lake Tempe, improvements in supervision, programs that support fishermen's productivity, as well as transparency and consistency in policy implementation are needed. Thus, it is hoped that the existing policies can better support the sustainability of fisheries resources and the welfare of local fishermen.

Keywords: lake tempe, fisheries resource management, fisheries policy, Regional Regulation No. 4 of 2012, policy evaluation, sosio-economic impact.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Akademis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Danau Tempe	7
1.6 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	7
1.7 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Wajo.....	8
1.8 Konsep dan Teori	9
1.8.1 Konsep Kebijakan Publik	9
1.8.2 Teori Evaluasi Kebijakan.....	10
Dampak Kebijakan.....	14
Pengaruh.....	15
REVISI PENELITIAN	18
Metode Penelitian.....	18
Sistematika.....	18



2.3	Teknik Pengumpulan Data	18
2.4	Sumber Data.....	19
2.5	Teknik Analisis Data	20
BAB III. HASIL PENELITIAN		21
3.1	Gambaran Umum Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Danau Tempe	21
3.1.1	Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe	21
3.1.2	Pengelolaan Danau Tempe	23
3.1.3	Tantangan Dalam Pengelolaan Tanau Tempe	30
3.2	Respon Nelayan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan .	37
3.3	Dinamika Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	44
3.4	Politisasi Perda dan Bantuan Alat Tangkap	56
3.5	Dampak Kebijakan Pengelolaan terhadap Nelayan	60
3.5.1	Dampak Sosial dan Ekonomi	61
3.5.2	Dampak Lingkungan	65
BAB IV. PEMBAHASAN.....		67
4.1	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Tempe	67
4.1.1	Tipologi Nelayan Danau Tempe.....	67
4.1.2	Tantangan dalam Pengelolaan	71
4.2	Respon Nelayan terhadap Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012	73
4.3	Intervensi terhadap Perda dan Relasi Patron-Klien	76
4.4	Konflik dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012	78
4.5	Kerangka Evaluasi Kebijakan Willian N. Dunn dalam mencermati Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012	81
4.6	Dampak Perda No. 4 Tahun 2012 terhadap Nelayan Danau Tempe	85
4.6.1	Dampak Sosial	85
4.6.2	Dampak Ekonomi.....	86
4.6.3	Dampak Lingkungan	87
V DAN SARAN		90
.....		90
.....		91
.....		93
.....		97



DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Kriteria Evaluasi	12
2. Tipe-tipe Evaluasi Formal	14
3. Data Rumah Tangga Perikanan setiap tahunnya	36



DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Siklus Kebijakan dan Siklus Informasi	13
2. Skema pikir penelitian	17
3. Jaring Pukat yang digunakan nelayan Pakkajalalla.....	27
4. Metode penangkapan ikan Bungka Toddo	31



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Danau Tempe adalah danau alami di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Danau ini terletak di tiga kabupaten: Wajo, Soppeng, dan Sidenreng Rappang. Luas wilayah Danau Tempe 13.750 hektar, terdiri dari 11,45 hektar di Kabupaten Wajo, 1.547 hektar di Kabupaten Soppeng, dan 750 hektar di Kabupaten Sidrap (Naing, 2019). Danau Tempe merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat, yang menggunakan danau ini untuk memancing ikan air tawar serta fungsi pertanian, perkebunan, dan perumahan di sekitarnya. Selain itu, Danau Tempe kaya akan biodiversitas, dengan ikan asli langka dan burung migrasi. Danau ini sangat penting untuk konservasi lingkungan karena menyediakan air untuk irigasi pertanian, air minum, pariwisata berbasis air, dan penambangan gas alam.

Danau Tempe tergolong dalam kategori Danau Tektonik Purba, Pelras (1996) menggambarkannya sebagai jalur pelayaran yang strategis. Pada masa itu, danau ini berfungsi sebagai pusat dua jalur pelayaran penting di Sulawesi Selatan: satu yang menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone dan yang lain yang menghubungkan Teluk Bone ke hulu sungai Walanae. Jalur pertama melewati Parepare Danau Sidenreng, dan Danau Tempe. Jalur kedua menghubungkan Teluk Bone ke hulu Sungai Walanae melalui Sungai Cenranae. Kedua rute tersebut sangat strategis pada saat itu karena tidak adanya jalur darat yang menghubungkan lokasi-lokasi tersebut. Hingga tahun 1828, Danau Tempe dapat dilayari oleh perahu besar, termasuk kapal layar Portugis, dari laut hingga ke Sidenreng (Sekarang Kabupaten Sidrap). Pemukiman di sekitar danau berkembang pesat, begitu pula dengan aktivitas perdagangan. Perdagangan dari sumber-sumber domestik dan asing menggunakan perahu layar besar, termasuk yang berasal dari Pelabuhan-pelabuhan Gresik, Palembang, Malaka, India, Campa, dan Eropa. Kondisi ini berlangsung dari abad ke-10 hingga akhir abad ke-14. Tidaklah mengherankan bahwa pada tahun 1970-an benda-benda bersejarah berupa jangkar kapal yang berukuran besar ditemukan di Danau Tempe, dan saat ini jangkar tersebut tersimpan di museum kota Sengkang (Naing, 2019).

Sejak awal, Danau Tempe telah dikenal sebagai sumber air yang menyebabkan banjir di Kabupaten Wajo (Tempo.co, 2010). Selama musim hujan, air akan meluap dan mencapai 30.000-43.000 hektar, membanjiri sawah, perkebunan, rumah-rumah di jalan dan jembatan, serta infrastruktur sosial lainnya, yang jumlahnya cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu tindakan yang dilakukan adalah pembangunan bendungan yang berfungsi untuk menahan air danau pada elevasi +5 meter.



Danau Tempe mengalami pendangkalan akibat pertumbuhan vegetasi, sedimentasi, dan okupasi lahan. Masalah yang paling

krusial yang dihadapi di Danau Tempe yakni laju sedimentasi yang sangat tinggi. Hal ini terjadi secara alami karena aliran sungai besar yang mengalir ke Danau Tempe yang mengakibatkan terjadinya pengendapan. Tidak hanya itu, berbagai faktor penyebab seperti polusi pertanian dan rumah tangga, penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), perubahan struktur biota akuatik, dan restocking yang belum optimal, mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan. Hal tersebut direspons oleh pemerintah pusat dengan melaksanakan program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2016 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditargetkan selesai pada tahun 2019 (PUPR, 2023). Selain itu, setelah bertahun-tahun mendorong pembangunan bendungan gerak, pembangunan akhirnya dilaksanakan pada tahun 2012 dan baru selesai pada tahun 2013 sebelum dioperasikan pada Oktober 2014. Penyelesaian bendungan tersebut tidak terpisah dari desakan para nelayan dan Rescue Forum Tempe Lake.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai Danau Tempe, antara lain eksplorasi kekuatan dan kepentingan aktor-aktor yang memanfaatkan danau (Sulaiman et al., 2022), kajian dinamika struktur jaringan sosial dan kontestasi dalam pengelolaan kolaboratif Danau Tempe (Said et al., 2019), kajian konsumsi dan produksi pangan (Ali et al., 2017), kajian ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di Danau Tempe (Yusran et al., 2019), dan dilema kebijakan revitalisasi Danau Tempe (Darti et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan di Danau Tempe masih minim dalam hal studi tentang intervensi pemerintah atau kebijakan terkait pengelolaan sumber daya perikanan. Namun, terdapat penelitian yang berfokus pada kebijakan revitalisasi danau, seperti penelitian Darti et al. (2022) yang dalam temuannya bahwa kebijakan revitalisasi yang dilakukan di Danau Tempe berimplikasi pada mata pencaharian masyarakat yang di sekitar Danau Tempe. Secara garis besar masyarakat terbagi atas dua kelompok, yakni kelompok petani dan nelayan. Kedua kelompok ini sangat bergantung pada tingkat elevasi air Danau Tempe, dengan adanya kebijakan revitalisasi menimbulkan polarisasi dalam melihat pemanfaatannya. Sebagian masyarakat terutama kelompok petani menolak mengenai kebijakan revitalisasi tersebut karena mereka memanfaatkan lahan pertanian pada musim kering. Revitalisasi dianggap menyebabkan lahan pertanian yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kemudian akan hilang.

Lebih lanjut, Darti et al. (2022) menjelaskan bahwa dampak lain yang dirasakan nelayan yang mengeluh akibat berkurangnya ikan-ikan di danau nelayan menjadi cenderung sulit untuk mendapatkan ikan. Hal ini memicu pemikiran tentang kemanfaatan dari program revitalisasi danau. Dampak dan pandangan berbeda dari segmen yang mengalami program tersebut. Artinya harapan untuk memberikan manfaat dari program tersebut tidak berlangsung secara maksimal. Pada konteks ini terdapat polarisasi persepsi masyarakat terkait dengan



kepentingan mereka atas kondisi Danau Tempe. Terdapat kelompok masyarakat yang yang menginginkan agar elevasi air Danau Tempe terus tinggi. Kelompok ini adalah kelompok nelayan *lanra*, *tongkang*, *jabba trawl/kawat* dan *jala*. Disaat bersamaan terdapat juga kelompok nelayan yang menginginkan elevasi air Danau Tempe rendah. Kelompok nelayan tersebut adalah Bungka Toddo, belle, dan setrum aki yang aktivitasnya hanya dapat dilakukan secara maksimal jika tingkat elevasi permukaan danau tempe menurun. Selain para kelompok nelayan yang terpolarisasi tersebut, beberapa segmen masyarakat petani di sekitar wilayah Danau Tempe juga sangat menginginkan air danau rendah/surut. Hal ini terkait dengan metode pemanfaatan lahan yang mereka gunakan yakni dengan bercocok tanam di tepi danau ketika permukaan airnya rendah. Dengan demikian, danau yang direvitalisasi melalui pengerukan maka kemungkinan lahan garapan mereka semakin dalam dan senantiasa akan tergenang air.

Selanjutnya, Wanti (2022) mencermati kebijakan pengelolaan Danau Tempe menggunakan kerangka penta helix. Wanti menjelaskan bahwa kerangka pentahelix secara struktural memenuhi indikator stakeholder, tetapi kerja sama hanya terbatas pada pemerintah, perusahaan, dan universitas. Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong semua stakeholder untuk bekerja sama dalam pengelolaan Danau Tempe Kabupaten Wajo karena keterlibatan masyarakat serat media belum tampak secara efektif.

Sebagai perbandingan, Danau Rawa Pening yang menjadi salah satu danau prioritas nasional bersama dengan Danau Tempe (Kemenkomarves, 2021). Danau Rawa Pening tidak hanya untuk perikanan saja, namun sangat multifungsi seperti irigasi, pembangkit listrik dan pariwisata. Pemanfaatan multifungsi tersebut saling mendukung namun di lain sisi juga menimbulkan konflik, terutama jika dihadapkan pada kepentingan stakeholder lokal. Implikasi dari pemanfaatan Danau Rawa Pening yang tidak teratur terjadi karena adanya polarisasi kepentingan yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Sejalan dengan kondisi pengelolaan Danau Tempe, pengelolaan Danau Rawa Pening masih terpusat pada kepentingan pemerintah pusat. Pemerintah merumuskan program revitalisasi yang salah satunya fokus pada sektor pariwisata, namun di sisi lain justru merugikan masyarakat setempat (Serat.ID, 2023). Dalam kasus ini, terdapat ketidakselarasan antara kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah mengenai manfaat akhir dari program revitalisasi dan efek yang dialami oleh masyarakat lokal danau.



atkan sumber daya di Danau Tempe, Pemerintah Daerah ah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda Kabupaten 012) tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Undang-lasi pembagian zona penangkapan ikan dan melarang tertentu. Perairan Danau Tempe dibagi menjadi tiga tipe pertama adalah area eksklusif milik pemerintah (*ex-ornament*), ayan melalui proses lelang. Selanjutnya, beberapa area dimiliki

secara pribadi (*Ongko*). Kemudian, ada zona akses terbuka. Dari tata letak zona penangkapan ikan, jelas bahwa tidak semua nelayan bebas menangkap ikan di area Danau Tempe.

Di Danau Tempe, menurut Said (2021) terdapat dua jenis nelayan: nelayan tradisional/kecil yang terus-menerus mengubah lokasi penangkapan ikan mereka, dikenal sebagai *Pakkajalalla*, dan nelayan besar yang beroperasi di zona eksklusif, mereka menangkap ikan di areal permanen yang dikuasai dikenal sebagai *Pallawang*. Dari kedua jenis nelayan tersebut, lebih lanjut Said menjelaskan dalam penemuannya bahwa terdapat disparitas antara nelayan *Pallawang* dan *Pakkajalalla*, dimana *Pallawang* memiliki modal dan jaringan sosial yang kuat. Selain itu, *Pallawang* memiliki wilayah potensial dan eksklusif (yang dimenangkan dari hasil lelang) sehingga memudahkan ketika persediaan terbatas. Sebaliknya, *Pakkajalalla* yang hanya diizinkan menjangkau zona bebas akses, karena area yang berpotensi tersebut telah dihuni oleh *Pallawang*. Lebih lanjut, Said menjelaskan perbedaan yang signifikan/adanya ketimpangan dalam hasil tangkapan ikan Danau Tempe dimana nelayan yang bermodal besar lebih diuntungkan dan mendominasi jaringan sosial dibandingkan nelayan kecil. Nelayan kecil cenderung termarginalkan sehingga merasa terpinggirkan, dan terkadang melakukan tindakan resistensi terhadap dominasi nelayan besar.

Salah satu Tindakan resistensi yang dilakukan oleh nelayan Danau Tempe yang merasa dirugikan, berkumpul di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tentang larangan penangkapan ikan di Danau Tempe, khususnya di Kecamatan Sabbangparu (Sulselexpose, 2021). Larangan ini terkait dengan penggunaan alat tangkap ikan yang disebut *renreng*. Masyarakat menyampaikan tujuan mereka, menekankan bahwa adanya larangan ini telah berdampak signifikan terhadap mata pencaharian mereka. Mereka mengatakan bahwa banyak pelanggaran terus terjadi di daerah tersebut, dan bahwa larangan ini bersifat diskriminatif, terutama jika dibandingkan dengan penggunaan jaring ikan (*lanra*) yang direkomendasikan oleh pemerintah melalui peraturan daerah. Masyarakat juga menekankan risiko kerugian bagi nelayan yang menggunakan *lanra*, terutama kerusakan yang disebabkan oleh ikan sapu-sapu (*tokek*) terhadap jaring ikan mereka. Oleh karena itu, masyarakat mengungkapkan keprihatinan dan mencari penyelesaian terkait situasi ini. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan tanggapan menunjukkan pentingnya menentukan jalan tengah yang dapat menyeimbangkan antara aturan yang dirancang untuk melindungi sumber daya lingkungan ekonomi para nelayan Danau Tempe.



tu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, nifikan di Danau Tempe terkait kepatuhan terhadap peraturan an alat tangkap ikan, seperti jaring ikan, memiliki pengaruh an, terutama dalam hal kerusakan yang disebabkan oleh ikan ng. Selain itu, terdapat hambatan yang cukup besar akibat

ketegangan antara kelompok nelayan, dengan pembatasan timbal balik pada aktivitas penangkapan ikan di daerah tersebut. Untuk menyelesaikan tantangan ini, pihak berwenang yang memiliki kendali atas aktivitas penangkapan ikan di Danau Tempe perlu terlibat dan bersikap proaktif (Sulsexpose, 2021).

Padahal kebijakan Perda Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 diharapkan agar berdampak kepada masyarakat nelayan untuk digunakan secara efektif sehingga berdaya guna serta berkelanjutan. Tentunya dengan adanya kebijakan ini diharapkan nelayan dapat meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan berkeadilan. Kebijakan ini juga mendukung perikanan berkelanjutan dan dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di komunitas nelayan. Dengan pendapatan yang lebih stabil serta lingkungan yang terjaga, nelayan dan keluarga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera, tidak hanya salah sebagian nelayan yang merasakan namun semua komunitas nelayan yang ada..

Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin tidak sejalan ketika mengembangkan dan menerapkan kebijakan perikanan, sehingga menjadikan tata Kelola yang baik sebagai komponen penting untuk memastikan pengelolaan perikanan yang adil dan berkelanjutan serta mendukung perubahan kebijakan (OECD Review of Fisheries 2020). Istilah tata Kelola perikanan mengacu pada keseluruhan sistem organisasi dan undang-undang yang mengontrol perumusan, persetujuan, dan pelaksanaan kebijakan perikanan. Oleh karena itu, mengubah dan mengelola kebijakan perikanan secara adil dan berkelanjutan memerlukan institusi tata kelola yang efektif. Terdapat banyak struktur kebijakan perikanan karena sistem tata kelola harus merespons situasi lokal tertentu. Penting untuk menetapkan kriteria luas mengenai apa yang membuat sistem tata kelola menjadi kuat. Namun, mungkin sulit untuk mengembangkan indikator-indikator yang sebanding karena beragamnya pendekatan di setiap negara ketika mengevaluasi keberhasilan sistem tata kelola dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, menghubungkan komponen kebijakan tertentu dengan kompleksitas sistem tata kelola dan dampak mediasi dari kebijakan itu sendiri merupakan tantangan tersendiri. Menurut penelitian tersebut, transparansi, keterlibatan, dan koherensi merupakan faktor penting dalam sistem tata kelola perikanan yang efisien. Alokasi sumber daya merupakan komponen utama dari banyak peraturan perikanan, dan modifikasi terhadap kebijakan dapat memberikan dampak menguntungkan atau merugikan bagi banyak pemangku kepentingan (Belschner et al., 2019).



Intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan telah dibahas dalam penelitian yang telah dilakukan di Danau Tempe. Oleh karena itu, ini penting untuk memahami intervensi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kompleksitas masalah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe mendorong untuk melakukan penelitian mendalam terkait dampak kebijakan tersebut. Dengan pemahaman

bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan secara langsung mempengaruhi distribusi hak akses, kontrol sumber daya, dan dinamika sosial di sekitar danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dengan melihat bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan (Perda Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012) tersebut terhadap nelayan di Danau Tempe. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap aktivitas politik yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Aktivitas politik memainkan peran krusial dalam bentuk dan pelaksanaan kebijakan, termasuk bagaimana keputusan diterapkan di lapangan. Dengan mengkaji dinamika politik yang terlibat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan serta memahami bagaimana kepentingan politik dan keputusan administratif berdampak pada pengelolaan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan mulai dari adanya peraturan daerah pengelolaan sumber daya perikanan tersebut (tahun 2012) sampai dengan tahun 2024. Mengingat kompleksitas permasalahan di Danau Tempe, diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam mengatasi masalah yang dihadapi nelayan Danau Tempe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo?
- b. Bagaimana respon nelayan Danau Tempe terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan Kabupaten Wajo?
- c. Bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan terhadap nelayan Danau Tempe (sosial, ekonomi, lingkungan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe



orasi respon nelayan Danau Tempe terhadap kebijakan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo.

dampak kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam kehidupan sosial, kesejahteraan nelayan, dan ekosistem Danau Wajo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pemahaman dan perbaikan mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.
- Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang mengkaji tentang pengelolaan sumber daya perikanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.
- Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nelayan lokal mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.

1.5 Danau Tempe

Danau Tempe merupakan salah satu danau purba yang terletak di Sulawesi Selatan. Secara administratif terletak di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo di sebelah utara hingga selatan, Kabupaten Soppeng di sebelah barat, dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat laut. Wilayah Danau Tempe yang termasuk dalam Kabupaten Wajo memiliki wilayah yang terluas meliputi 4 (empat) kecamatan yang berbatasan langsung dengan danau diantaranya Kecamatan Tanasitolo di sebelah timur, Kecamatan Belawa di sebelah utara, Kecamatan Tempe di sebelah timur, dan Kecamatan Sabbangparu di sebelah selatan.

Masyarakat yang menghuni Danau Tempe mayoritas beretnis Bugis. Umumnya mereka menggunakan bahasa Bugis dalam percakapan sehari-hari. Agama yang dianut masyarakat sekitar Danau Tempe adalah agama Islam. Kebanyakan masyarakat masih mempraktekkan tradisi lokal seperti upacara perkawinan, kematian, hingga tradisi selamatan (*ma'bacca*). Salah satu tradisi leluhur yang masih dipertahankan adalah tradisi *maccera' tappareng*. Masyarakat yang berada di pesisir Danau Tempe bekerja sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Umumnya masyarakat nelayan tersebar di Kelurahan Laelo, Salomenraleng, dan Mattirotappareng Kecamatan Tempe. Wilayah tersebut sangat strategis, selain berhadapan langsung dengan danau, juga berdekatan dengan Sengkang yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wajo.



Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan adalah proses yang melibatkan berbagai elemen yang dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat

ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi penangkapan ikan, perlindungan habitat, hingga pengelolaan stok ikan dan partisipasi masyarakat lokal.

Konsep pengelolaan perikanan ditemukan dalam pasal 1 ayat 7 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomo 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa “Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pendekatan yang holistik dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa perikanan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pesisir dan konservasi lingkungan.

1.7 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Wajo

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Wajo. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mengatur tata kelola sumber daya perikanan agar digunakan secara efektif sehingga berdaya guna dan berkelanjutan. Sumber daya perikanan yang merupakan suatu potensi daerah perlu pengaturan dan dimanfaatkan dengan optimal dengan memperhatikan kelestariannya.

Dalam peraturan daerah ini, dijabarkan jenis alat tangkap ikan yang boleh dan yang tidak boleh digunakan. Salah satu alat tangkap yang dilarang di kawasan perairan danau Tempe adalah *jabba*, yang berarti semua kegiatan yang dilakukan *pa'jabba* dikategorikan illegal. Selain *jabba*, penggunaan setrum aki juga dilarang. Metode tangkap lainnya yang disebut *Bungka Toddo'* hanya diatur mengenai ukuran dan jarak diantara unitnya. Dalam hal jumlah kepemilikan, *Bungka Toddo'* hanya dapat dimiliki maksimal 4 unit. Beberapa aturan informal berupa larangan-larangan yakni: 1) larangan menangkap ikan pada malam jumat; 2) larangan menyebrangkan mayat di danau; 3) larangan menangkap ikan tanpa penutup kepala; 4) larangan bernyanyi di danau kecuali lagu pemanggil ikan; 5) larangan berduaan dengan lawan jenis di danau (Sudiman, 2023).



secara jelas dicantumkan jenis-jenis alat tangkap yang dilarang *jabba*, setrum aki, *bunre*, *jala massalebbo*, bahan peledak, dan rang, namun masih banyak nelayan yang menggunakan alat usnya *jabba*, yang merupakan perangkap ikan yang paling elayan. Selain itu, nelayan danau Tempe juga memanfaatkan gondok) untuk menangkap ikan yang dikenal dengan istilah

Bungka Toddo'. Biasanya, nelayan yang menggunakan *Bungka Toddo*' memiliki modal yang besar dan dikerjakan minimal 20 orang sehingga hasil tangkapan ikan yang diperoleh tergolong besar dalam sekali panen (Sudirman, 2023).

Mengenai penguasaan lahan di kawasan danau Tempe, ada 3 (tiga) rezim kepemilikan, yaitu lahan *ex-ornament* milik pemerintah, milik pribadi (*ongko*) dan lahan bebas akses. Said (2021) mengungkapkan bahwa di masa lalu semua areal lahan baik perairan maupun daratan pinggiran merupakan areal bebas akses (*open access*) semua warga dan dikelola secara komunal. Warga lokal bebas memanfaatkan sumber daya alam di Danau Tempe dan siapapun tidak boleh menguasai atau memiliki lahan orang per orang. Namun saat ini rezim kepemilikan dan pola pemanfaatan mengalami pergeseran dari rezim komunal bergeser ke milik negara (*ex-ornament*), milik pribadi (*ongko*), dan Sebagian masih daerah bebas (*open access area*). Pengelolaan *ex-ornament* diatur dalam Perda Kab. Wajo No. 4 Tahun 2012 pasal 36, dimana pelaksanaan lelang untuk lahan tersebut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.8 Konsep dan Teori

1.8.1 Konsep Kebijakan Publik

Dye (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan), selanjutnya dikemukakan bahwa menurut Dye bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan memberi pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Menurut Anderson (2015) bahwa kebijakan publik itu adalah “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dalam hal ini lebih menekankan pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.



on mengemukakan karena itulah kebijakan publik memiliki pertama, kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan a serampangan. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola kan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan i yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya menetapkan Undang-Undang mengenai suatu hal, tetapi juga beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah

apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur aktivitas publik dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Dalam artian positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Dengan demikian menurut Nugroho (2017) akar kebijakan publik adalah politik. Politik berkenaan dengan peran kekuasaan untuk melakukan alokasi sumber daya langka, dalam rangka pencapaian tujuan politik tertentu. Selanjutnya, Nugroho mengemukakan bahwa salah satu hakikat kebijakan publik adalah konflik, khususnya dalam rangka memperebutkan sumber daya politik pada suatu kawasan, baik sumber daya politik yang berasal dari ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kebijakan publik muncul di tengah konflik, dan sebagian besar untuk mengatasi konflik yang telah, sedang dan yang akan terjadi.

1.8.2 Teori Evaluasi Kebijakan

Thomas Dye menawarkan defenisi luas mengenai evaluasi, bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Dye, 1987).

Parsons (2006), membagi evaluasi menjadi dua aspek yang saling terkait:

- a. Evaluasi kebijakan dan kandungan programnya
- b. Evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.

Menurut Dunn (1999), istilah evaluasi secara umum dapat ditemukan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakannya pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan juaan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa um telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti alah kebijakan dibuat atau diatasi.



Dunn (1999) membagi karakteristik evaluasi kebijakan menjadi empat bagian:

1. Fokus Nilai
Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi fakta nilai
Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau
Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.
4. Dualitas nilai
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu memengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Dalam analisis kebijakan, evaluasi menurut Dunn (1999) memiliki sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu: seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah terlayani melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai diperjelas dengan analisis dan mengoperasionalkan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dan ditanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam pemecahan masalah yang dituju.



3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu di defenisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, akan digunakan kriteria untuk evaluasi kebijakan. Kriteria evaluasi diteraan secara retrospektif (*ex-post*). Kriteria ini disajikan dalam **Tabel 1**, sebagai berikut.

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

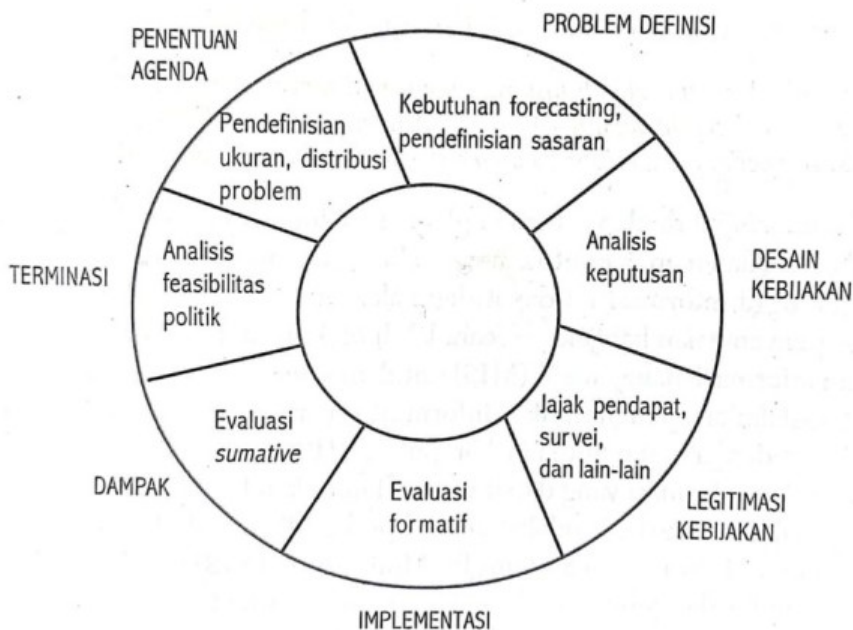
Tabel 1. Kriteria Evaluasi (Dunn, 1999)

Selanjutnya, Dunn (1999) membagi tiga pendekatan evaluasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai yang dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak konroversial.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang n metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid percaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi it atas dasar tujuan program kebijakan dan administrator imsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk nilai kebijakan program.



3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.



Gambar 1. Siklus Kebijakan dan Siklus Informasi (Palumbo, 1987)

Dalam siklus kebijakan yang digambarkan Palumbo, evaluasi kebijakan terbagi dalam dua kategori:

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi (Palumbo, 1987). Oleh karena itu, fase implementasi memerlukan evaluasi "formatif" yang memonitor cara di mana sebuah program dikelola atau diatur untuk mendapatkan umpan balik yang berfungsi untuk meningkatkan proses



atif

siklus kebijakan Palumbo (fase dampak), informasi evaluatif "formatif" yakni berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program berdampak pada problem yang ditanganinya. Fase ini adalah

fase pasca-implementasi di mana evaluasi dimaksudkan untuk memperkirakan efek dari intervensi.

Dunn memasukkan kategori evaluasi “formatif” dan “sumatif” ke dalam evaluasi formal, secara jelas dalam tabel sebagai berikut:

KONTROL TERHADAP AKSI KEBIJAKAN	ORIENTASI TERHADAP PROSES KEBIJAKAN	
	Formatif	Sumatif
Langsung	Evaluasi perkembangan	Evaluasi eksperimental
Tidak Langsung	Evaluasi Proses retrospektif	Evaluasi hasil retrospektif

Tabel 2. Tipe-tipe Evaluasi Formal (Dunn, 1999)

Variasi evaluasi perkembangan menunjuk pada kehatian-kegiatan atau aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi proses retrospektif cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi. Evaluasi eksperimental meliputi pemantauan dan evaluasi hasil di bawah kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Evaluasi hasil retrospektif juga meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.

Dalam penelitian ini, akan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo mengenai Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Tipe evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formal dari William N. Dunn, dengan kategori kebijakan yang telah digambarkan dalam siklus kebijakan Palumbo yakni evaluasi sumatif yang melihat bagaimana kebijakan/program berdampak pada masalah yang ditanganinya. Evaluasi sumatif dengan tipe evaluasi hasil retrospektif, yang mana analisis retrospektif dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.



Dampak Kebijakan

Menurut Rossi et al. (2004) bahwa penilaian atas dampak kebijakan harus memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak kebijakan adalah memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi – yakni perkiraan

dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.

Dye (1981) mendefinisikan dampak kebijakan sebagai keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Akib (2009) mengidentifikasi beberapa dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, yaitu: dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target, dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan, biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber daya dan dana yang telah digunakan dalam program, dan biaya tidak langsung kebijakan yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan lain serta penolakan dalam bentuk demonstrasi dan unjuk rasa. Selain itu, mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan juga sulit, namun dampak simbolis kebijakan dapat memberikan indikasi tersebut.

Lebih lanjut Akib (2009) menjelaskan bahwa “dampak kebijakan tidak sama dengan “Output kebijakan”. Dalam menganalisis kebijakan, perlu membedakan antara *Output* dan *Outcome* dalam kebijakan publik. *Output* kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dan seringkali hanya mencerminkan aktivitas tanpa memperlihatkan perubahan yang diinginkan. Sebaliknya *Outcome* kebijakan adalah konsekuensi yang terjadi di masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. *Outcome* ini mencakup perubahan sosial, ekonomi, atau perilaku yang terjadi karena kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Dye (1981), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata-mata. Hal ini perlu dicermati karena seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah – mengukur *Output* kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran *Output* kebijakan publik sangat penting diperhatikan, namun dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah tersebut.

1.9 Kerangka Berpikir

Bagian ini bertujuan untuk menyajikan kerangka berpikir yang menjadi landasan dan arah penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan struktur dan panduan penelitian yang membantu memahami hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir yang relevan serta konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibahas dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe.

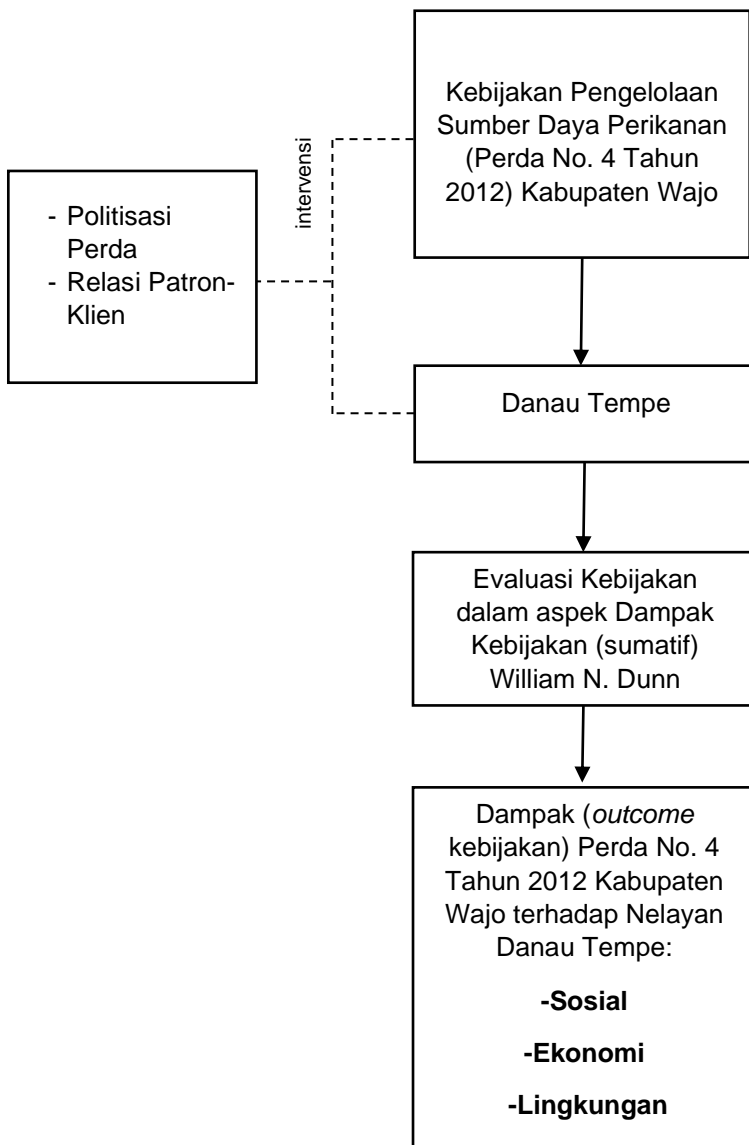


Studi ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kebijakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe dengan menggunakan konsep kebijakan publik, dampak kebijakan dan teori evaluasi kebijakan untuk mengkaji dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan Kabupaten Wajo. Pendekatan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana intervensi pemerintah mempengaruhi dinamika pengelolaan sumber daya perikanan dalam konteks Danau Tempe. Analisis ini membantu memahami dampak dari intervensi pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terhadap nelayan Danau Tempe.

Selain itu, dalam penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini juga disarankan, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan konteks lokal dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Danau Tempe. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di Danau Tempe.

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, “Dampak Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Terhadap Nelayan Danau Tempe”, maka skema pikir dalam penelitian ini sebagai berikut





Gambar 2. Skema pikir penelitian

